

ANALISIS PENGARUH INVESTASI PEMERINTAH DAN SWASTA TERHADAP PENCIPTAAN KESEMPATAN KERJA DI SUMATERA UTARA

**LAILAN SAFINA
SRI ENDANG RAHAYU**

ABSTRACT

Problem statement of this research is : 1. What is the influence of the domestic investment to the development of industry in Medan town?, and 2. What is the influence of the foreign investment to the development of industry in Medan town? The purpose of this research is to know what is the influence of the domestic investment and foreign investment to the development of industry in Medan. The source of data in this research comes from secondary data in the form of yearly report that comes from official government or Medan Central Bureau Statistic, Planning and Development Province office, Investment and Promotion office. Technique analysis data use the econometrics model using ordinary least square (OLS).

Based on the result of research, domestic investment has a positive influence to the development industry of Medan with coefficient which means every increment 1% domestic investment, will cause the raise development industry in Medan as big as 0,001%. Also with the foreign investment has a positive influence to development of industry in Medan as big as 0,001%. Determination coefficient shows that as a whole domestic investment and foreign investment explain the influence of their relation with the development industry in Medan as big as 73,1% and the rest so much as 26,9% is explained by other statistical variable that are not include in the estimation model.

Keywords: domestic investment, foreign investment, development of industry.

PENDAHULUAN

Investasi sebagai indikator dari tumbuh kembangnya ekonomi di suatu wilayah atau daerah. Investasi merupakan faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi, dan investasi sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi kesempatan kerja. Munculnya investasi akan mendorong munculnya proses produksi (output) dan output tersebut salah satu dihasilkan oleh manusia di dalamnya.

Jadi hubungan antara investasi dengan kesempatan kerja sangat erat kaitannya, dimana munculnya investasi pasti akan memunculkan produksi yang dilakukan oleh beberapa tenaga kerja. Besarnya investasi di suatu negara/daerah menggambarkan besarnya aktivitas perekonomian, dan besarnya aktivitas perekonomian menggambarkan proses produksi yang cukup tinggi.

Investasi merupakan suatu faktor krusial bagi kelangsungan proses pembangunan ekonomi (sustainable development), atau pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Dengan adanya kegiatan produksi maka terciptalah kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat meningkat, yang selanjutnya menciptakan/meningkatkan permintaan pasar (Tambunan, 2001).

Jadi pendapat di atas menjelaskan tentang pengaruh yang ditimbulkan oleh investasi, dimana munculnya investasi akan mendorong kesempatan kerja dan peningkatan terhadap pendapatan. Peningkatan pendapatan akan menambah tabungan masyarakat, dan peningkatan tabungan masyarakat akan mendorong peningkatan investasi disebabkan oleh bunga bank yang cukup rendah sehingga banyak pengusaha menginvestasikan modalnya ke sektor ekonomi.

Sumatera Utara yang relatif sangat luas yaitu sebesar 73.587 km merupakan salah satu wilayah yang cukup potensial di negara Indonesia, ditinjau dari kerangka makro dan juga letak geografis yang strategis. Selain itu juga memiliki potensi ekonomi yang cukup besar, karena merupakan daerah yang memiliki potensi dalam bidang perkebunan dan pertanian yang dapat menghasilkan devisa bagi negara. Potensi inilah yang perlu dikembangkan dengan menambah segala daya kemampuan dan kemauan baik dari segi modal maupun ketenaga kerjaan, khususnya produktivitas dan kesempatan kerja.

Kondisi lain menunjukkan bahwa PDRB propinsi Sumatera Utara dari tahun ke tahun mengalami perkembangan atau peningkatan. Dengan meningkatnya PDRB tersebut akan dapat meningkatkan kegiatan investasi swasta, karena tidak semua pendapatan tersebut digunakan oleh pemerintah daerah, artinya ada kelebihan dari pengeluaran pemerintah yang disimpan, yang dalam hal ini disamakan dengan investasi. Jadi dengan peningkatan PDRB setiap tahunnya, tentu akan berpengaruh terhadap pertumbuhan investasi di Sumatera Utara. Tetapi kenyataannya tidak demikian, dibandingkan pencapaian nilai investasi asing dan lokal tahun 2007, maka jumlah investasi tahun 2008 ini masih terbilang kecil.

Investasi asing di tahun sebelumnya bisa mencapai Rp 3,03 Milyar dan investasi lokal senilai Rp 1,6 triliun. Pencapaian nilai investasi asing dan lokal di Provinsi Sumatera Utara hingga September 2008, baru mencapai Rp 343,5 Milyar.

Tenaga kerja yang berhasil diserap pada 2007 sebanyak 10.800 orang, jumlah tenaga kerja yang berhasil diserap hingga September 2008 masih sedikit. Dari 18 proyek PMA dan PMDN yang sudah terealisasi 3.256 tenaga kerja yang berhasil diserap. Yakni 2.493 dari PMA dan 763 orang dari PMDN. Umumnya, tenaga kerja yang diserap itu bergerak di sektor industri jasa, makanan, logam dan lainnya.

KAJIAN TEORI

Pengertian Investasi

Penanaman modal atau lebih sering disebut investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran atau perbelanjaan penanaman-penanaman modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-perengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian. Adakalanya penanaman modal dilakukan untuk menggantikan barang-barang modal yang lama dan perlu didepresiasi (Sukirno, 2002).

Investasi adalah pengeluaran yang ditunjukkan untuk meningkatkan atau mempertahankan stok barang modal. Stok barang modal (capital stocks) terdiri dari pabrik, mesin kantor dan produk-produk tahan lama lainnya yang digunakan dalam proses produksi (Dornbusch, 2001).

Dalam prakteknya, dalam usaha untuk mencatat nilai penanaman modal yang dilakukan dalam suatu tahun tertentu, yang digolongkan sebagai investasi (pembentukan modal atau penanaman modal) meliputi pengeluaran/pembelanjaan yang berikut :

1. Pembelian berbagai jenis barang modal, yaitu mesin-mesin dan peralatan produksi lainnya untuk mendirikan berbagai jenis industri dan perusahaan.
2. Pembelanjaan untuk membangun rumah tempat tinggal, bangunan kantor, bangunan pabrik dan bangunan-bangunan lainnya.
3. Pertambahan nilai stok barang-barang yang belum terjual, bahan mentah dan barang yang masih dalam proses produksi pada akhir tahun perhitungan pendapatan nasional.

Jumlah dari ketiga jenis komponen investasi tersebut dinamakan investasi bruto, yaitu ia meliputi investasi untuk menambah kemampuan memproduksi dalam perekonomian dan mengganti barang modal yang telah didepresiasi. Apabila investasi bruto dikurangi oleh nilai depresiasi maka akan didapat investasi neto (Tambunan, 2001).

Menurut Sukirno (2002), faktor-faktor utama yang menentukan tingkat investasi adalah :

1. Tingkat keuntungan investasi yang diramalkan akan diperoleh.
2. Tingkat bunga.
3. Ramalan mengenai keadaan ekonomi dimasa depan.
4. Kemajuan teknologi.
5. Tingkat pendapatan nasional dan perubahan-perubahannya.
6. Keuntungan yang diperoleh perusahaan-perusahaan.

Teori Pengeluaran Pemerintah

Pemerintah tidak cukup hanya meraih tujuan akhir dari setiap kebijakan pengeluarannya, tetapi juga harus memperhitungkan sasaran antara yang akan menikmati atau terkena kebijakan tersebut. Memperbesar pengeluaran dengan tujuan semata-mata untuk meningkatkan pendapatan nasional atau memperluas kesempatan kerja adalah tidak memadai melainkan harus memperhitungkan siapa (masyarakat lapisan mana) yang bekerja atau meningkat pendapatannya. Pemerintah pun perlu menghindari agar peningkatan perannya dalam perekonomian justru melemahkan kegiatan pihak swasta (Dumairy, 2006).

Rostow dan Musgrave menyatakan bahwa yang menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi yang dibedakan antara tahap awal, tahap menengah, dan tahap lanjut. Pada tahap awal perkembangan ekonomi, persentase investasi pemerintah terhadap total investasi besar sebab pada tahap ini pemerintah harus menyediakan prasarana seperti pendidikan, kesehatan, prasarana transportasi dan sebagainya.

Pada tahap menengah pembangunan ekonomi, investasi pemerintah tetap diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat tinggal landas, namun pada tahap ini peran investasi swasta sudah semakin besar. Peran pemerintah tetap besar pada tahap menengah, oleh karena itu peran swasta yang semakin besar ini banyak menimbulkan kegagalan pasar (*market failure*), dan juga menyebabkan pemerintah harus menyediakan barang dan jasa publik dalam jumlah yang lebih banyak dan kualitas yang lebih baik. Selain itu, pada tahap ini perkembangan ekonomi menyebabkan terjadinya hubungan antar sektor yang sudah semakin rumit (*complicated*). Misalnya pertumbuhan ekonomi yang ditimbulkan oleh perkembangan sektor industri, makin tinggi tingkat pencemaran udara dan air, dan pemerintah harus turun tangan untuk mengatur dan mengurangi akibat negatif dari polusi itu terhadap masyarakat. Pemerintah juga harus melindungi buruh yang berada dalam posisi yang lemah agar dapat meningkatkan kesejahteraan mereka. Dalam suatu proses pembangunan menurut Musgrave, rasio investasi swasta dalam persentase terhadap GNP semakin besar dan persentase investasi pemerintah dalam persentase terhadap GNP akan semakin kecil.

Pada tingkat ekonomi yang lebih lanjut, Rostow berpendapat bahwa pembangunan ekonomi, aktivitas pemerintah beralih dari penyediaan prasarana pengeluaran-pengeluaran untuk aktivitas sosial seperti program kesejahteraan hari tua, program pelayanan kesehatan dan sebagainya (Mangkoesoebroto, 2002).

Di negara manapun selalu ada campur tangan atau investasi pemerintah dalam perekonomian. Dalam perekonomian modern, peranan pemerintah dapat diklasifikasikan dalam 3 golongan besar, yaitu :

1. Peranan alokasi, yaitu peranan pemerintah dalam alokasi sumber-sumber ekonomi.
2. Peranan distribusi.
3. Peranan stabilisasi (Mangkoesoebroto, 2002)

Kesempatan Kerja

Kesempatan kerja adalah kesempatan untuk berusaha dan berpartisipasi dalam pembangunan, jelas akan memberikan hak bagi manusia untuk menikmati hasil dari pembangunan. Kesempatan kerja itu timbul karena adanya investasi dan usaha untuk memperluas kesempatan kerja ditentukan oleh laju pertumbuhan investasi, laju pertumbuhan penduduk dan angkatan kerja. Strategi pembangunan yang diterapkan juga akan mempengaruhi usaha perluasan kesempatan kerja.

Pendekatan ekonomi yang hanya berorientasi kenaikan Gross Domestic Product tidak akan berhasil dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Sedangkan pendekatan sumber daya manusia menjanjikan pertumbuhan ekonomi yang diimbangi dengan pemerataan, baik kesempatan kerja maupun pendapatan (Tjiptoherijanto, 1997).

Strategi pembangunan dan sasaran tujuan nasional harus benar-benar memperhatikan aspek sumber daya manusia dalam memasuki lapangan kerja. Orientasi untuk peningkatan GDP harus terlebih dahulu diikuti oleh peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan dan ketrampilan yang memadai agar dalam

pembangunan tersebut peningkatan GDP juga diikuti dengan peningkatan produktivitas kerja.

Tenaga kerja merupakan faktor produksi yang sangat penting yang secara aktif mengolah sumber lain. Tenaga kerja adalah penduduk yang sedang atau sudah bekerja, sedang mencari pekerjaan dan yang melakukan kegiatan-kegiatan lain, seperti bersekolah dan mengurus rumah tangga. Batas umur tenaga kerja minimum 10 tahun tanpa batas umur maksimum (Simanjuntak, 1998).

Tenaga kerja adalah penduduk yang berumur didalam batas usia kerja, baik yang sedang bekerja maupun sedang mencari pekerjaan dengan batas usia minimum 10 tahun keatas tanpa batas umur maksimum (Dumairy, 2006).

Dari pengertian di atas dapatlah diketahui bahwa tenaga kerja yaitu meliputi penduduk yang berusia 10 tahun keatas, baik yang sudah bekerja maupun yang sedang mencari pekerjaan serta yang melakukan kegiatan lain, seperti bersekolah, dan mengurus rumah tangga serta golongan lain yang menerima pendapatan. Pada kenyataannya batas usia 10 tahun keatas bukanlah merupakan suatu kriteria tenaga kerja yang tetap. Batas usia tersebut bisa saja berubah sesuai dengan kondisi yang ada. Tujuan dari pemilihan batas umur tersebut adalah supaya definisi yang diberikan sedapat mungkin sebagai gambaran keadaan yang sebenarnya.

Tiap negara memiliki batas umur yang berbeda-beda karena situasi dan kondisi tenaga kerja di masing-masing negara juga berbeda. Memilih batas umur 10 tahun untuk Indonesia berdasarkan fakta bahwa masih banyak penduduk berumur muda terutama di desa-desa yang sudah bekerja atau mencari pekerjaan. Berdasarkan perumusan di atas, kita dapat melihat bahwa batas umur maksimum tenaga kerja tidak ada. Alasannya adalah Indonesia belum mempunyai jaminan sosial nasional, hanya sebagian penduduk Indonesia yang merasakan atau menerima tunjangan di hari tua. Buat golongan inipun, pendapatan yang mereka terima tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari. Oleh sebab itulah mereka yang telah mencapai usia pensiun biasanya masih harus tetap kerja. Tidak dapat dipungkiri bahwa mereka dalam usia pensiun masih aktif dalam kegiatan ekonomi dan tetap digolongkan sebagai tenaga kerja, itulah mengapa di Indonesia tidak menganut batas umur maksimum.

Di dalam pengertian tenaga kerja itu juga dimaksudkan kelompok yang sedang mencari pekerjaan, bersekolah dan mengurus rumah tangga, meskipun mereka tidak bekerja tetapi secara fisik mereka mampu bekerja dan sewaktu-waktu dapat ikut bekerja. Inilah alasannya kelompok ini juga dimasukkan ke dalam kelompok tenaga kerja. Dua golongan pertama yaitu penduduk yang sudah bekerja dan yang sedang mencari pekerjaan disebut angkatan kerja. Sedangkan kelompok yang terakhir yaitu penduduk yang bersekolah, mengurus rumah tangga dan menerima pendapatan lain disebut bukan angkatan kerja (*Potencial Labor Force*).

Berdasarkan uraian di atas dapatlah disimpulkan bahwa tenaga kerja meliputi :

Tenaga Kerja = Angkatan Kerja + Bukan Angkatan Kerja

Angkatan kerja adalah sebagian dari jumlah penduduk yang mempunyai dan tidak mempunyai pekerjaan yang telah mampu dalam arti sehat fisik dan mental dan secara yuridis tidak kehilangan kebebasan untuk memilih dan melakukan pekerjaan tanpa ada unsur paksaan (Suroto, 1992).

Angkatan kerja adalah penduduk dalam usia kerja yaitu 15 tahun ke atas yang bekerja dan yang tidak bekerja dan yang sedang mencari pekerjaan. Namun usia 10 sampai 14 tahun disebut penduduk yang terpaksa bekerja (Tjiptoherijanto, 1997).

Dari kedua batasan di atas dapatlah ditarik kesimpulan bahwa yang termasuk dalam angkatan kerja adalah penduduk yang berusia 10 tahun ke atas baik yang sedang bekerja maupun yang sedang mencari pekerjaan.

Hubungan Antara Investasi Pemerintah (Belanja Pemerintah) dan Investasi Swasta dengan Kesempatan Kerja

Penanaman modal merupakan langkah awal kegiatan produksi. Dengan posisi semacam itu, investasi pada hakekatnya juga merupakan langkah awal kegiatan pembangunan ekonomi. Dinamika penanaman modal mempengaruhi tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi, yang mencerminkan marak lesunya pembangunan. Dalam upaya menumbuhkan perekonomian, setiap daerah senantiasa berusaha menciptakan iklim yang dapat menggairahkan investasi. Sasaran yang dituju bukan hanya masyarakat atau kalangan swasta dalam negeri, tapi juga investor asing.

Mayoritas investasi oleh pihak swasta tertanam di sektor sekunder atau sektor industri pengolahan (*manufacturing*), baik PMDN maupun PMA, baik dilihat berdasarkan jumlah proyek maupun berdasarkan nilai investasinya. Dalam hal ini diukur menurut nilai persetujuan investasi, subsektor industri kimia menempati urutan teratas, baik untuk PMDN maupun PMA, subsektor tekstil lebih dinikmati oleh investor dalam negeri. Di lain pihak investor dari luar negeri lebih meminati subsektor perhotelan dan restoran. Urutan terbawah diduduki oleh sektor perdagangan (PMDN) dan subsektor tanaman pangan (PMA). Subsektor yang sama tidak menariknya bagi investor domestik dan investor asing agaknya adalah industri farmasi (Dumairy, 2006).

Dengan adanya investasi pemerintah maupun investasi swasta baik PMA dan PMDN akan dapat menciptakan kesempatan kerja bagi masyarakat dan dapat pula meningkatkan pendapatan bagi masyarakat.

Hipotesis

Hipotesis merupakan kesimpulan sementara yang masih diuji kebenarannya. Adapun kesimpulan sementara yaitu : investasi pemerintah dan investasi swasta mempunyai pengaruh positif terhadap penciptaan kesempatan kerja di Sumatera Utara.

METODE PENELITIAN

Definisi Operasional Variabel

Adapun yang menjadi definisi operasional pada penelitian ini adalah :

1. Investasi pemerintah (X_1) adalah belanja modal pemerintah yaitu selisih antara penerimaan daerah dengan belanja aparatur negara di Sumatera Utara. Dihitung dalam bentuk rupiah per tahun dari tahun 1994-2008.
2. Investasi Swasta adalah penanaman modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) di Sumatera Utara.

- Penanaman Modal Asing/PMA (X_2) adalah investasi yang diperoleh dari negara luar yang mempunyai fungsi sebagai pemacu untuk menciptakan kesempatan kerja bagi masyarakat dan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat yang terdapat di Sumatera Utara. Dihitung dalam bentuk rupiah per tahun dari tahun 1994-2008.
 - Penanaman Modal Dalam negeri /PMDN (X_3) adalah pihak swasta yang mempunyai modal dalam negeri baik perorangan maupun badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia yang terdapat di Sumatera Utara. Dihitung dalam bentuk rupiah per tahun dari tahun 1994-2008
3. Kesempatan kerja (Y) adalah tenaga kerja yang bekerja pada semua sektor/lapangan usaha di Sumatera Utara. Kesempatan kerja dalam penelitian ini adalah jumlah orang yang telah bekerja per tahun dari tahun 1994 - 2008.

Teknik Analisis Data

Dalam teknik analisis data dalam melihat besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen digunakan model ekonometrika dengan meregresikan variabel-variabel yang ada dengan menggunakan metode Ordinary Least Square (OLS). Sifat dari data yang digunakan adalah data time series (data menurut runtun waktu) yaitu data berkala dari tahun 1994 - 2008.

Selanjutnya data tersebut akan dianalisis secara kuantitatif dengan metode regresi berganda dengan menggunakan SPSS. Model ekonometrika dengan persamaan regresi :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \mu$$

Dimana :

Y	= kesempatan kerja di Sumatera Utara
α	= konstanta
$\beta_1, \beta_2, \beta_3$	= koefisien regresi
X_1	= Investasi pemerintah di Sumatera Utara
X_2	= PMA di Sumatera Utara
X_3	= PMDN di Sumatera Utara
μ	= Term error

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Pengaruh Investasi Pemerintah dan Investasi Swasta Terhadap Penciptaan Kesempatan Kerja Di Sumatera Utara

1) Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk melihat apakah datanya terdistribusi secara normal atau tidak, tujuannya adalah untuk menguji apakah dalam model regresi linier tersebut, baik variabel independen maupun variabel dependen memiliki distribusi normal. Model estimasi penelitian ini bebas dari penyakit *normal probability*, hal ini dapat dilihat dari tabel normal probability yang sebaran data terletak di sekitar garis lurus, berarti ini menunjukkan tidak adanya penyakit *normal probability*.

2) Analisis Autokorelasi

Analisis Autokorelasi adalah suatu model analisis yang digunakan untuk menguji apakah hasil estimasi suatu model regresi mengandung korelasi serial variabel dan menggunakan uji Durbin Watson untuk mendapatkan nilai-nilai kritis d yaitu nilai Durbin Watson upper (d_u) dan nilai Durbin Watson lower (d_l).

Pengujian $\alpha = 5\%$

D_w hitung = 1,001

d_l (0,82)

d_u (1,75)

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, dapat ditentukan bahwa : d_l tabel < D_w hitung < d_u tabel yaitu $0,82 < 1,001 < 1,75$, dengan demikian H_0 diterima, yang artinya bahwa tidak terjadi autokorelasi atau bebas dari penyakit autokorelasi karena hasil $D_w = 1,001$.

3) Analisis Multikolinierity

Analisis multikolinierity adalah suatu metode analisis yang digunakan untuk melihat apakah adanya hubungan yang kuat diantara variabel bebas dengan variabel terikat dari suatu model estimasi. Model estimasi penelitian bebas dari penyakit multikolenierity, hal ini dapat dilihat dari tabel Collinearity Diagnostics, dimana angkanya mendekati angka 1 atau dengan nilai 1,150, 2,085 dan 2,298. Berarti hal ini menunjukkan tidak adanya penyakit multikolinearity.

4) Analisis Heterokendastisitas

Analisis Heterokendastisitas merupakan salah satu uji penyimpangan klasik, yang merupakan salah satu metode pengujian untuk melihat adanya varians yang tidak sama dalam observasi dari suatu variabel dan dari variabel pengganggu atau error term (μ). Heterokendastisitas merupakan salah satu kondisi dimana penyebaran (variens) dari pengganggu μ untuk setiap variabel X merupakan suatu angka yang tidak konstan (penyimpangan dari asumsi heterokendastisitas). Model estimasi penelitian ini bebas dari penyakit heterokendastisitas, hal ini dapat dilihat dari gambar scatterplot yang tidak membentuk pola, berarti ini menunjukkan tidak adanya penyakit Heterokendastisitas.

5) Uji Hipotesis

Tabel 1. Hasil Regresi dari SPSS

Model	Regresion	Unstandardized Coefficient	R Square	T	F	DW	VIF
1	(Constant)	4665576,641	0,296	34,900	1,543	1,001	1,150 2,085 2,298
	Inv.Pemerintah	80,882		0,4901			
	PMDN	-0,174		-0,640			
	PMA	2,044		1,616			

a. Dependent Variabel : Kesempatan kerja

b. Predictors : (Constant), Investasi Pemerintah, PMDN, PMA

Setelah diregresikan data yang telah diperoleh maka persamaan regresi berikut dan kemudian akan di analisis dengan menggunakan hasil regresi berikut ini :

$$Y = 4665576,641 + 80,882 X_1 - 0,174 X_2 + 2,044 X_3 + \mu$$

Dimana :

Y	=	Kesempatan kerja di Sumatera Utara (jiwa)
X ₁	=	Investasi Pemerintah (dalam Milyar Rupiah)
X ₂	=	PMDN (dalam jutaan Rupiah)
X ₃	=	PMA (dalam ribuan dolar)
μ	=	Term of error

Berdasarkan hasil model estimasi dapat diinterpretasikan sebagai berikut :

- Bahwa variabel X₁ (Investasi Pemerintah) mempunyai pengaruh positif terhadap penciptaan kesempatan kerja di Sumatera Utara dengan besar koefisien 80,882. Artinya apabila investasi pemerintah naik 1%, ceteris paribus maka tingkat kesempatan kerja di Sumatera Utara naik sebesar 80,882%.
- Bahwa variabel X₂ (PMDN) mempunyai pengaruh negatif terhadap penciptaan kesempatan kerja di Sumatera Utara dengan besar koefisien - 0,174. Artinya apabila PMDN naik 1%, ceteris paribus maka tingkat kesempatan kerja di Sumatera Utara turun sebesar 0,174%.
- Bahwa variabel X₃ (PMA) mempunyai pengaruh positif terhadap penciptaan kesempatan kerja dengan besar koefisien 2,004. Artinya apabila PMA naik 1%, ceteris paribus maka tingkat kesempatan kerja di Sumatera Utara naik sebesar 2,004%.

6) Koefisien Determinasi (R Square)

Koefisien Determinasi (R Square) berarti proporsi variabel total dalam variabel tidak bebas yang dijelaskan oleh variabel bebas secara bersama-sama. Besarnya biasanya antara 0 (nol) dan 1 (satu). Kalau R Square sama dengan 1, berarti garis yang disamakan dapat menjelaskan 100% variasi dalam variabel terikat. Sebaliknya, bila R Square sama dengan 0, berarti model tidak menjelaskan sedikitpun variasi dalam variabel bebas (Gujarati, 1995).

Koefisien R Square dengan nilai 0,296 yang artinya secara bersama-sama Investasi pemerintah, PMDN dan PMA mampu memberikan variasi penjelasan penciptaan kesempatan kerja sebesar 29,6%, sedangkan sisanya sebesar 70,4% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam estimasi model atau berada dalam *disturbance error term*.

7) Uji t statistik

Uji t statistik merupakan pengujian secara individual untuk membuktikan bahwa koefisien regresi ini secara statistik signifikan.

a) Pengaruh Investasi pemerintah terhadap penciptaan kesempatan kerja

Dengan $\alpha = 5\%$ maka nilai t tabel = 2,145, Df = 15-1 = 14. Nilai t hitung = 0,4901. Berdasarkan hasil perhitungan, dapat ditentukan bahwa: t-hitung < t-tabel yaitu 0,4901 < 2,145 maka H₀ diterima artinya pengaruh investasi pemerintah tidak signifikan terhadap penciptaan kesempatan kerja di Sumatera Utara pada tingkat kepercayaan 95% ($\alpha = 5\%$).

b) Pengaruh PMDN terhadap penciptaan kesempatan kerja

Dengan $\alpha = 5\%$ t tabel = 2,145 Df = 15-1 = 14, nilai t hitung = -0,640. Berdasarkan hasil perhitungan, dapat ditentukan bahwa: t-hitung < t-tabel

yaitu $-0,640 < 2,145$ maka H_0 diterima artinya pengaruh PMDN tidak signifikan terhadap penciptaan kesempatan kerja di Sumatera Utara pada tingkat kepercayaan 95% ($\alpha = 5\%$).

c) Pengaruh PMA terhadap penciptaan kesempatan kerja

Dengan $\alpha = 5\%$, $t_{\text{tabel}} = 2,145$, $Df = 15-1 = 14$, maka nilai $t_{\text{hitung}} = 1,616$. Berdasarkan hasil perhitungan, dapat ditentukan bahwa: $t_{\text{hitung}} < t_{\text{tabel}}$ yaitu $1,616 < 2,145$ maka H_1 diterima artinya pengaruh PMA tidak signifikan terhadap penciptaan kesempatan kerja di Sumatera Utara pada tingkat kepercayaan 95% ($\alpha = 5\%$).

8) Uji F Statistik

Uji F statistik berguna untuk pengujian secara serentak apakah secara keseluruhan koefisien regresi tersebut signifikan dalam menentukan nilai variabel terikat (dependen variabel). Dengan nilai $\alpha = 5\%$; $n - k = 12$, maka $F_{\text{tabel}} = 3,49$ dan $F_{\text{hitung}} = 1,543$

Berdasarkan hasil perhitungan, dapat ditentukan bahwa: $F_{\text{hitung}} < F_{\text{tabel}}$ yaitu $1,543 < 3,49$ maka H_0 diterima artinya secara bersama variabel Investasi pemerintah, PMDN dan PMA berpengaruh tidak signifikan terhadap tingkat penciptaan kesempatan kerja di Sumatera Utara pada tingkat kepercayaan 95% ($\alpha = 5\%$).

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian “Analisis Pengaruh Investasi Pemerintah dan Swasta terhadap Penciptaan Kesempatan Kerja di Sumatera Utara” dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Investasi pemerintah mempunyai pengaruh positif terhadap tingkat penciptaan kesempatan kerja di Sumatera Utara dengan besar koefisien 80,882. Artinya apabila investasi pemerintah naik 1%, ceteris paribus maka tingkat kesempatan kerja di Sumatera Utara naik sebesar 80,882%. Variabel X_2 (PMDN) mempunyai pengaruh negatif terhadap penciptaan kesempatan kerja di Sumatera Utara dengan besar koefisien $-0,174$. Artinya apabila PMDN naik 1%, ceteris paribus maka tingkat kesempatan kerja di Sumatera Utara turun sebesar 0,174%. Variabel X_3 (PMA) mempunyai pengaruh positif terhadap penciptaan kesempatan kerja dengan besar koefisien 2,004. Artinya apabila PMA naik 1%, ceteris paribus maka tingkat kesempatan kerja di Sumatera Utara naik sebesar 2,004%.
2. Koefisien R Square dengan nilai 0,296 yang artinya secara bersama-sama Investasi pemerintah, PMDN dan PMA mampu memberikan variasi penjelasan tingkat kesempatan kerja sebesar 29,6%, sedangkan sisanya sebesar 70,4% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam estimasi model atau berada dalam *disturbance error term*.

Saran

Melihat kondisi kesempatan kerja di Sumatera Utara pada periode 1994-2008, serta hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka diberi beberapa saran sebagai berikut :

1. Pemerintah perlu membuat dan melaksanakan kebijakan-kebijakan yang bertujuan untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi peningkatan investasi, antara lain :
 - Kepastian hukum bagi para investor.
 - Pemerintah mengalokasikan dana ke sektor-sektor yang mempunyai potensi dalam meningkatkan kegiatan ekonomi di Sumatera Utara.
 - Membuat fasilitas yang memadai untuk meningkatkan minat investor untuk mau berinvestasi di Indonesia khususnya di Sumatera Utara.
2. Seluruh instansi yang terkait hendaknya menyediakan informasi yang akurat, lengkap, relevan dan transparan tentang perkembangan yang terjadi dalam kegiatan meningkatkan investasi di Sumatera Utara.
3. Seluruh instansi yang terkait juga harus bekerjasama untuk meningkatkan investasi dan penciptaan kesempatan kerja yang lebih baik di masa datang.
4. Kinerja dan efisiensi BAINPROM hendaknya ditingkatkan baik dari segi pelaksanaan ataupun cara menarik investor serta adanya independensi BAINPROM dalam menentukan kebijakan penanaman modal di daerah yang berkaitan dengan izin investasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hakim, 2002, “Analisis Investasi”, Salemba Empat, Jakarta.
- Pandji Anoraga, 1994, “Perusahaan Multinasional dan Penanaman Modal Asing”, Pustaka Jaya, Semarang.
- Bappeda kota Medan, 2006, “ICOR kota Medan”, Medan.
- Bappeda kota Medan, 2005, “Kota Medan Pintu Gerbang Indonesia Bagian Barat”, Medan.
- BAINPROM Sumatera Utara, 1996-2006, “Laporan Penanaman Modal di kota Medan”, Medan.
- BPS kota Medan, 2007, “Medan dalam Angka”, Medan.
- Dumairy, 1996, “Perekonomian Indonesia”, Erlangga, Jakarta.
- Gujarati, Damodar, 1995, “Ekonomitrika Dasar”, Erlangga, Jakarta.
- Kartasapoetra dkk, 1995, “Manajemen Penanaman Modal Asing”, Bina Aksara, Jakarta.
- Sadono Sukirno, 2000, “Pengantar Teori Makro Ekonomi”, Rajawali Press, Jakarta.
- Sudarsono, 2002, “Pengantar Ekonomi Perusahaan”, Rineka Cipta, Jakarta.